



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-22/PB/PB.6/2021 16 Agustus 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan KPPN Bulan Juli sampai dengan November 2021

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
sesuai daftar terlampir

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka rekonsiliasi periode bulan Juli s.d. November 2021, proses *upload/push* data pada Aplikasi e-Rekon&LK dapat mengakibatkan perubahan data Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Semester I tahun 2021. Seluruh UAKPA/B, UAPPA/B-W, UAPA/B-E1 dan UAPA/B agar telah mengunduh Laporan Keuangan Semester I tahun 2021 dari Aplikasi e-Rekon&LK.
2. Kementerian Negara/Lembaga yang membutuhkan *backup database* Aplikasi e-Rekon&LK atas LKKL Semester I tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dapat menyampaikan surat permintaan ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA/Satuan Kerja dengan KPPN untuk periode bulan Juli s.d. November 2021 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

Periode	<i>Open period</i> tahap I	Periode penyelesaian rekonsiliasi	Batas waktu status "Menunggu TTD KPA" tidak kena sanksi	TMT pengenaan sanksi	<i>Closed period</i>	<i>Open period</i> tahap II
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Juli 2021	18 – 26 Agustus 2021	18 – 27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	28 – 31 Agustus 2021
Agustus 2021	1 – 13 September 2021	3 – 14 September 2021	14 September 2021	14 September 2021	14 September 2021	15 – 29 September 2021
September 2021 (TW III)	1 – 13 Oktober 2021	4 – 14 Oktober 2021	14 Oktober 2021	14 Oktober 2021	14 Oktober 2021	15 – 29 Oktober 2021
Oktober 2021	11 – 19 November 2021	15 – 22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021	20 - 22 November 2021	23 – 29 November 2021
November 2021	1 – 13 Desember 2021	3 – 14 Desember 2021	14 Desember 2021	14 Desember 2021	14 Desember 2021	15 – 30 Desember 2021

4. Pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017 akan diberikan apabila proses rekonsiliasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam angka 3 kolom (3) masih belum mendapat persetujuan KPPN sehingga belum memperoleh status "Menunggu TTD KPA". Pengenaan sanksi terhitung mulai tanggal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kolom (4).

5. Dalam rangka menyelesaikan sanksi rekonsiliasi dan perbaikan data laporan keuangan, periode *upload/push* data bulan berkenaan ke Aplikasi e-Rekon&LK akan dibuka kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kolom (6). Pengenaan sanksi bulan berkenaan otomatis gugur apabila telah terbit BAR pada bulan berikutnya.
6. Dalam hal satker telah memperoleh BAR (status "BAR siap download") dan bilamana akan melakukan *upload/push* ulang data ke Aplikasi e-Rekon&LK, agar terlebih dahulu mengajukan permohonan reset BAR ke KPPN. Pengajuan reset BAR dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan *user* KPA, selanjutnya satker menyampaikan informasi permohonan reset BAR ke KPPN melalui sarana tercepat.
7. Rekonsiliasi TDK Segmen COA merupakan syarat terbitnya BAR, kecuali perbedaan tanggal dan dokumen DIPA serta TDK segmen COA akun kas BLU.
8. Bagi satker inaktif bersaldo agar tetap melaksanakan *upload/push* data sampai dengan status satker inaktif bersaldo berubah menjadi satker inaktif tidak bersaldo.
9. Kementerian Negara/Lembaga agar mendorong penyelesaian likuidasi seluruh satker inaktif bersaldo di lingkungannya sebagai bagian dari prasyarat kelancaran migrasi saldo awal dalam rangka implementasi SAKTI.
10. Jadwal rekonsiliasi periode bulan Desember 2021 dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan akan diatur lebih lanjut.
11. Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B E-1, UAPPA/B-W, dan UAKPA/B.
12. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi e-Rekon&LK dapat dilakukan melalui Layanan Helpdesk HAI DJPb pada *website* hai.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-22/PB/PB.6/2021

Tanggal : 16 Agustus 2021

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN**

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban